

THE DEBT OF HONOUR : HUBUNGAN FILIPINA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

Oleh: **Yasmis**
Dosen Sejarah FIS UNJ

Abstrak

Gerakan Katipunan berhasil memproklamkan kemerdekaan Filipina dari Spanyol pada 1896. Akan tetapi lepas dari penjajahan Spanyol, Filipina kembali masuk dalam penjajahan Amerika Serikat. Namun berbeda dengan Spanyol, Amerika Serikat merasa wajib bukan hanya memberikan kemerdekaan yang selama ini didambakan oleh elit intelektual dan sebagian besar rakyat Filipina, tetapi juga menyiapkan mereka agar bisa mengelola suatu bentuk negara modern atas dasar demokrasi liberal seperti yang diberlakukan di Amerika Serikat.

Kata kunci:

Filipina, Kolonial, Spanyol, Amerika Serikat

Pendahuluan

Sejarah bangsa Filipina sesuai yang tercatat dari sumber dokumen sejarah telah ada sejak sebelum kedatangan bangsa Barat di Asia Tenggara. Namun demikian perkembangan tersebut tidak banyak diketahui mengingat laporan yang menyebutkan situasi tersebut tidak menjelaskannya. Ketika Asia Tenggara mengalami gelombang Indianisasi dengan penyebaran agama Hindu dan Buddha bersama peradabannya pada millennium pertama Masehi, kepulauan Filipina hamper tidak tersentuh sama sekali. Baru pada sekitar abad XIII ada sedikit informasi yang menyebutkan bahwa Filipina pernah, setidaknya sebagian wilayahnya di bagian selatan, mengalami kekuasaan kerajaan Hindu Majapahit dari Jawa. Meskipun bertahan selama sekitar 50 tahun,

Majapahit tidak menimbulkan perubahan yang berarti pada masyarakat Filipina. Tidak ada proses penyebaran agama dan peradaban klasik India di wilayah yang didudukinya. Begitu juga tidak terdapat laporan jelas tentang adanya institusi politik yang berkembang di wilayah Filipina pada saat Majapahit berkuasa. Demikian pula setelah kemunduran Majapahit, kerajaan Hindu Jawa ini juga tidak meninggalkan suatu koloni Hindu di sana seperti halnya yang terjadi di Malaka.¹

¹ Faktor utama yang mungkin menjadi pertimbangan bagi Majapahit adalah kurang strategisnya wilayah tersebut bagi jalur perdagangan maritim internasional saat itu dan tidak adanya potensi agraris Filipina. Periksa tentang kekuasaan Majapahit ini pada D.G.E. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, terj. Soewarno, (Surabaya: Usaha Nasional, 1988).

Islam mulai muncul pada tahun 1380 karena disebarkan oleh musafir Araab di Sulu sehingga mendirikan Kesultanan Sulu pada abad XV yang menyebar di Mindanao pada awal abad XVI dan terus meluaskan pengaruhnya sampai Luzon, Cebu, dan teluk Manila. Penyebaran Islam baru terhenti ketika terjadi pendudukan oleh Spanyol di Luzon.² Di daerah Mindanao, Islam cukup berakar hingga dipeluk oleh masyarakat luas sampai sekarang. Penyebaran Islam terutama di utara ini baru terhenti ketika ekspansi Spanyol terjadi pada akhir abad XVI.

Bangsa Spanyol muncul di perairan Filipina pertama kali pada awal abad XVI dalam gelombang pelayaran samudra. Dengan didasari oleh kepentingan ekonominya untuk mencari rempah-rempah dan menjamin pangkalan bagi pelayaran perdagangan peraknya antara koloninya di Meksiko dan Cina, penguasa Spanyol menjadikan Filipina sebagai tempat transit dan sumber tenaga kerja. Namun ancaman perompakan yang kebanyakan dilakukan oleh para pelaut Mindanao sering menyeret Spanyol bukan hanya dalam konflik dengan para penguasa pribumi setempat namun juga dengan kekuatan kolonial lainnya seperti VOC dan Portugis.³

² Periksa D.J.M. Tate, *The Making of Modern Southeast Asia, Volume I*, (Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1977), hh. 335-337.

³ Hal ini terjadi misalnya dalam serangan armada Spanyol terhadap benteng Ternate pada tahun 1603. Periksa Ch. F. van Fraasen, *Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel, deel II* (disertasi S3 Rijkuniversiteit Leiden, 1987, tidak diterbitkan), h. 380. Dengan bangsa Portugis, orang-orang Spanyol juga berperang di perairan Asia Tenggara sejak akhir abad XV hingga

Sebagai pusat kekuasaan, Spanyol menunjuk Manila yang dianggap strategis dengan pelabuhannya. Sebagai penguasa tertinggi di Filipina, seorang gubernur diangkat dengan kedudukan di Manila. Gubernur ini memerintah sebagai wakil dari raja Spanyol dan dibantu oleh semacam mahkamah agung atau *audencia* yang khususnya bertugas untuk memberikan nasehat resmi.⁴ Di bawahnya terdapat penguasa daerah yang bertanggung jawab kepadanya yaitu *alcades mayores* dan orang-orang pribumi yang diangkat untuk memerintah setiap satuan lokal atau *pueblos*, yang sering disebut sebagai *gobernadorcillos*. Meskipun dalam struktur pemerintahan ini orang-orang pribumi dilibatkan, namun bukan berarti penguasa Spanyol memberikan otonomi luas kepada penduduk Filipina. Model pemerintahan dan birokrasi Spanyol diatur sangat ketat dengan peluang yang sangat terbatas bagi penduduk pribumi dalam menentukan kebijakan politik di tingkat lokal.

Bagi penguasa Spanyol, penyebaran dan pemeluk agama Katolik oleh penduduk setempat akan memberikan jaminan bagi kepatuhan

pertengahan abad XVI. Periksa tentang konflik ini yang melibatkan kerajaan Ternate dan Tidore dalam Willard A. Hanna dan Des Alwi, *Turbulent Times Past in Ternate and Tidore*, (Mollucas, Rumah Budaya Banda Naira, 1990), hh. 38-43. Periksa juga tentang konflik Spanyol yang menyeret keterlibatan VOC di Maluku dalam G.J. Knaap, *Kruidnagelen en Christenen: De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Bevolking van Ambon 1656-1696*, (Dordrecht, Foris Publications, 1987), h. 20.

⁴ Para penakluk Spanyol ini kemudian disebut *conquistadors*. Periksa J.H. Parry, *The Spanish Seaborne Empire*, (London: Hutchinson, 1971), hh. 131-132.

mereka terhadap penguasa baru dan membuka peluang bagi penduduk pribumi untuk mengalami kemajuan peradaban, sekaligus untuk mencegah penyebaran Islam dari Mindanao ke utara. Dampak dari penyebaran Katolik yang intensif ini adalah perubahan budaya yang besar bagi masyarakat Filipina.⁵

Di bidang perekonomian pemerintah Spanyol menjadikan Filipina sebagai tempat transit bagi perdagangan peraknya yang dikelola antara Meksiko dan Cina. Penguasa Spanyol menerapkan monopoli dalam berbagai aspek perekonomian seperti perdagangan, agrarian, dan perpajakan. Penguasa Spanyol juga menarik orang-orang Cina untuk datang yang menjadi dominan di Filipina. Pada abad XIX seiring dengan melemahnya kekuatan ekonomi Spanyol sebagai akibat dari berakhirnya perdagangan galleon mereka, orang-orang Cina tersebut mampu mempersiapkan diri untuk tampil sebagai kelompok ekonomi yang dominan. Suatu kelompok etnis Filipina keturunan Cina mulai tumbuh dan perlahan-lahan dengan kekuatan ekonomi dan edukasinya menduduki jabatan-jabatan penting dalam masyarakat.⁶

⁵ Katolik yang kemudian dianut oleh sebagian besar masyarakat Filipina menjadi simbol pemersatu bangsa karena dua hal: para misionaris meninggalkan pusat kekuasaan Spanyol sehingga melepaskan identitas mereka sebagai alat penguasa, dan yang kedua karena mereka tinggal di kalangan rakyat sehingga bisa melakukan interaksi langsung dengan kalangan bawah masyarakat Filipina. Periksa Brian Harrison, *Southeast Asia A Short History*, (London: MacMillan, 1954), h. 133.

⁶ Periksa Davis Joel Steinberg, *The Philippines: A Singular and a Plural Place*, (Boulder: Westview Press, 1994), hh. 42-43. Disamping itu di kalangan masyarakat Filipina terdapat gambaran plural. Ada

Di bidang politik, orang-orang Spanyol berkuasa di segala aspek kehidupan social masyarakat Filipina dan menduduki jabatan-jabatan strategis yang mengontrol serta menguasai pemerintahan di Filipina. Di sektor pendidikan pembatasan yang ketat diberikan. Syarat-syarat yang semakin berat seiring dengan naiknya jenjang pendidikan telah menutup jalan bagi rakyat Filipina untuk melakukan mobilitas. Pendidikan menengah ke atas terutama yang disediakan oleh penguasa Spanyol hanya terbatas bagi anak-anak keturunan Spanyol atau mereka yang mampu membayar dengan standar ekonomi tinggi.

Situasi tersebut telah menimbulkan kekecewaan dan keresahan di kalangan masyarakat. Gerakan perlawanan terhadap Spanyol yang muncul adalah revolusi yang salah satu tokohnya adalah Emilio Aquinaldo bernama gerakan Katipunan. Gerakan ini dicetuskan pada tanggal 26 Agustus 1896 dan diikuti oleh kelompok elit intelektual Filipina. Katipunan mengajukan tuntutan merdeka penuh dari kekuasaan Spanyol. Salah satu tokoh yang menjadi idolanya adalah Dr. Jose Rizal dengan karya novelnya yang terkenal *Noli me Tangere* (jangan sentuh aku). Pada puncaknya gerakan

juga kelompok keturunan Mestizo yang berasal dari perkawinan orang Cina dengan penduduk setempat. Ini dipicu oleh peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa Spanyol pada awal pertengahan abad XIX yaitu bahwa orang-orang Cina dilarang tinggal di Filipina kecuali mereka masuk Katolik. Untuk itu pembauran antara orang-orang Cina dengan komunitas lokal bukan hanya terjadi dari jalur agama namun juga melalui perkawinan dan akhirnya membentuk sistem kekerabatan. Mereka ini kemudian akan membentuk bangsa Filipina yang baru.

Katipunan memproklamkan negara Filipina yang baru yaitu Republik Biacnabato dengan Aquinaldo sebagai presiden dan Tagalog sebagai bahasa nasional pada bulan Nopember 1896. Akibatnya penguasa Spanyol menawari perdamaian dengan Katipunan. Hasil pembicaraan itu adalah bahwa pemerintah Spanyol bersedia melakukan pembaharuan dalam administrasi dan system pemerintahannya namun dengan syarat Aquinaldo harus meninggalkan Filipina. Namun setelah Aquinaldo meninggalkan Filipina, pemerintah Spanyol tidak menepati janjinya.⁷

Dari penjelasan tersebut, suatu asumsi bias ditarik bahwa pemerintahan kolonial Spanyol di Filipina selama hampir empat abad telah menimbulkan penderitaan bagi bangsa Filipina. Meskipun peradaban Filipina dan kelompok generasi mudanya sangat dipengaruhi oleh ajaran Gereja Katolik yang dibawa oleh penguasa Spanyol, namun budaya Spanyol tidak dapat meresap hingga ke akar lapisan bawah masyarakat. Eksploitasi ekonomi dan dominasi politik yang berlebihan, ditambah dengan kurangnya perhatian penguasa Spanyol terhadap kemajuan bangsa

⁷ Periksa tentang ini dalam David Joel Steinberg, *op.cit.*, hh. 63-64. Dalam periode beberapa abad kekuasaan Spanyol di Filipina, sejumlah pemberontakan besar telah meledak seperti pemberontakan Miquel Lanab dan Alabahan tahun 1627, Sumoroy tahun 1649, Francisco Maniago tahun 1660, pemberontakan Manila-Bulacan tahun 1745-1746, peristiwa Bohol tahun 1744, Cruz Palaris tahun 1762 dan masih beberapa pemberontakan lagi sepanjang abad XIX. Pada umumnya penyebab utama dari pemberontakan ini adalah eksploitasi ekonomi yang berlebihan dan keinginan untuk terbebas dari penindasan itu. Karena sifatnya yang terbatas pada lokalitas tertentu, aparat militer Spanyol dengan mudah menindas pemberontakan ini.

Filipina, menjadi sumber perlawanan yang tumbuh di mana-mana dari rakyat Filipina.

Filipina bagian dari Pax Americana 1898-1942

Sebagai akibat dari kekalahan Spanyol dalam perang melawan Amerika Serikat, Spanyol harus menyerahkan tanah jajahannya termasuk Filipina. Sejak awal pemerintahannya, sikap penguasa Amerika Serikat sangat berbeda dengan sistem yang dianut oleh Spanyol terhadap tanah koloni itu.⁸ Karena perbedaan sosial dan agama antara Amerika Serikat dan Filipina, kebijakan politik yang diterapkan Amerika Serikat di Filipina lebih banyak tergantung pada kondisi lokal dan hanya instruksi yang tiba dari Washington secara garis besar.

Amerika Serikat merasa wajib bukan hanya memberikan kemerdekaan yang selama ini didambakan oleh elit intelektual dan sebagian besar rakyat Filipina, namun juga menyiapkan mereka agar bias mengelola suatu bentuk negara modern atas dasar demokrasi liberal seperti yang diberlakukan di Amerika Serikat. Langkah-langkah segera diambil ke arah itu seperti membebaskan para tahanan politik termasuk memanggil kembali Aquinaldo dari pengasingannya di luar negeri. Hal ini dipelajari oleh

⁸ Beberapa faktor menjadi alasan yang mewarnai kebijakan Amerika Serikat selama penjajahannya di Filipina. Yang pertama, penguasa Amerika Serikat menganut pandangan anti-kolonial yang telah menjiwai pemikiran para elit politik Amerika Serikat sejak berakhirnya Perang Budak tahun 1865. Faktor kedua adalah arti penting Filipina bagi keuntungan ekonomi Amerika Serikat.

pemerintah kolonial Amerika Serikat yang segera mengambil langkah untuk menyesuaikan diri. Pada tahun 1901 langkah pertama diambil oleh pemerintah Amerika Serikat dengan membuka program pendidikan massal bagi masa depan yang lebih cerah.⁹ Begitu juga dengan status Gereja Katolik dalam kehidupan sosial masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti. Akibatnya kebijakan Amerika Serikat tersebut disambut dengan baik oleh masyarakat Filipina.¹⁰

Langkah penting lain yang ditempuh oleh penguasa kolonial Amerika Serikat adalah ketika ide pemberian kemerdekaan dilontarkan pada tahun 1907. Ini ditandai dengan pembentukan badan perwakilan *Phillipine Assembly* yang menampung beberapa orang elit Filipina untuk duduk di dalamnya. Perluasan peranan politik elit Filipina terjadi dengan munculnya *Jones Law* pada

⁹ Dalam hal ini perlu dilihat ucapan Gubernur Jenderal Taft pada tahun 1908: “*The educated Filipino is an aristocrat by Spanish association. He prefers that his children should not educated at the public schools and this accounts for the large private school which the religious order and at least one Filipino association are able to maintain...*” Lihat Renato Constantino, *Neocolonial Identity and Counter Consciousness*, (London: Merlin Press, 1978), h. 123.

¹⁰ Proses ini merupakan langkah awal Westernisasi Filipina menurut model Amerika Serikat. Suatu hal penting di sini yang tidak dilakukan oleh Spanyol adalah memberikan pelajaran kepada bangsa Filipina untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar sehari-hari. Dengan penguasaan bahasa tersebut, bangsa Filipina merasa tidak berbeda dari penjajahnya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi di bawah penjajahan Spanyol. Sekaligus penggunaan bahasa Inggris ini memiliki pengaruh yang luas pada psikologi orang-orang Filipina, yang segera menerima bentuk budaya dan pemikiran Barat dari Amerika Serikat. Periksa ini dalam *Ibid.*, hh. 218-219.

tahun 1916 yang memberikan otonomi dalam negeri. Sementara itu langkah menuju kemerdekaan dipertegas dengan munculnya *Tydings-McDuffie Act* tahun 1934 yang menandai awal pengawasan Amerika Serikat bagi periode transisi menuju kemerdekaan selama 10 tahun.¹¹ Suatu gebrakan baru yang diciptakan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam konteks pembaharuan politik ini adalah membuka peluang dan kesempatan bagi generasi intelektual muda Filipina untuk meneruskan jenjang pendidikannya ke universitas-universitas Amerika Serikat dengan pemberian beasiswa. Di bidang ekonomi pemerintah kolonial Amerika Serikat mengambil kebijakan yang agak berbeda dengan programnya di bidang politik. Meskipun ada intensifikasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat kepada bangsa Filipina khususnya pada sektor agraria dibandingkan ketika diperintah oleh Spanyol, dominasi dan monopoli ekspor perdagangan diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun mengingat kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang lebih mengutamakan perdagangan produk ekspor dan harapan membawa Filipina menuju kemerdekaan, perkebunan

¹¹ Proses menuju kemerdekaan yang dijanjikan oleh Amerika Serikat di bidang politik bagi Filipina ini tidak selalu berjalan lancar. Pada masa pemerintahan Gubernur Leonard Wood (1921-1927) ada kecenderungan memperlambat langkah itu mengingat kondisi krisis ekonomi dunia yang mengancam perekonomian Amerika Serikat khususnya bagi kebutuhan produk tropisnya, berbeda dengan Gubernur Jenderal Francis B. Harrison (1913-1921) yang cenderung mempercepat proses tersebut. Periksa hal ini dalam Jan Pluvier, *South-East Asia from Colonialism to Independence*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974), h. 6.

milik para pengusaha swasta tidak dapat berkembang di Filipina seperti halnya di Malaya dan Indonesia. Akibatnya konflik agraria antara perusahaan perkebunan dan penduduk petani yang menjadi pemilik tanah jarang terjadi di Filipina.¹²

Meskipun ada kebijakan ekonomi dari pemerintah kolonial Amerika Serikat, namun dampak-dampak yang dirasakan oleh rakyat Filipina tidak berupa penderitaan. Amerika Serikat mendorong produktivitas agraria dan industri oleh bangsa Filipina sendiri dan siap menampung produknya sebagai pemasaran di negaranya. Janji kemerdekaan, program mencerdaskan warga di tanah jajahannya, berbagai peraturan yang anti-diskriminasi, jaminan kesejahteraan ekonomi serta sikap humanism pada tindakan pemerintah Amerika Serikat di Filipina telah menciptakan suasana baru dalam dinamika kehidupan bangsa Filipina.

Filipina di bawah Jepang 1942-1945

Pendudukan Filipina oleh tentara Jepang merupakan dampak dari Perang Pasifik antara Jepang melawan Sekutu sejak 7 Desember 1941. Setelah berhasil mengusir pasukan Amerika Serikat, Jepang menerapkan pemerintahan di Filipina dengan system pemerintahan militer. Satuan AD-XIV (Angkatan Darat Ke Duapuluh empat) memegang kekuasaan

administrasi atas Filipina di bawah pimpinan pemerintahan militer (Gunseikan). Penguasa militer Jepang merubah semua struktur yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat termasuk mengganti bahasa Inggris dengan bahasa Filipina dan bahasa Jepang.

Seperti halnya di tanah jajahan yang lain, pemerintah militer Jepang berusaha mengambil hati bangsa Filipina untuk mendukung perangnya. Penguasa Jepang menyadari bahwa bangsa Filipina memiliki hubungan erat dengan bekas penjajah Baratnya karena janji kemerdekaan yang diberikan. Oleh karena itu penguasa militer Jepang juga memberikan harapan akan pemberian kemerdekaan kepada bangsa Filipina. Janji tersebut dikabulkan pada bulan Oktober 1943 dengan pemerintahan Republik Filipina di bawah Laurel. Harapan Jepang adalah agar pemerintahan baru di Filipina ini menunjukkan kesetiiaannya kepada Jepang dengan menyatakan perang melawan Sekutu. Namun di sisi lain kebebasan politik tidak diberikan oleh penguasa militer Jepang kepada rakyat Filipina. Pemerintahan Laurel juga merupakan pemerintahan boneka Jepang.

Kepercayaan rakyat Filipina kepada Jepang yang datang sebagai pembebas mereka dari penjajahan Amerika Serikat sejak awal tidak pernah ada. Sebaliknya kedatangan Jepang disambut dengan kebencian dan kecurigaan yang menggagalkan rencana kemerdekaan mereka. Hal ini diperparah lagi oleh eksploitasi ekonomi dan kebijakan yang menindas kehidupan masyarakat Filipina, termasuk pengerahan tenaga kerja

¹² Dalam hal ini peranan pedagang perantara Cina sangat dominan. Posisi mereka terletak antara petani Filipina dan pengusaha Amerika Serikat yang menampung hasil produksi pertanian dan perkebunan. Periksa Jan Pluvier, *op.cit.*, hh. 29-30.

paksa. Pada masa pendudukan Jepang ini, Filipina mengalami penderitaan ekonomi yang luar biasa termasuk juga kemacetan dalam perkembangan tingkat intelektualnya.

Akibatnya beberapa elit intelektual Filipina tetap bergerak di bawah tanah untuk menyiapkan kembali kedatangan pasukan Mc. Arthur. Hal ini terwujud pada bulan Januari 1945 yang segera mengakhiri pemerintahan Jepang atas Filipina. Jenderal Mc. Arthur sebagai panglima perang Amerika Serikat segera mengembalikan semua pemerintahan Amerika Serikat di Filipina dan mengambil langkah-langkah untuk menyiapkan Filipina menuju kemerdekaan sesuai dengan program pemerintah Amerika.

Kemerdekaan Filipina 14 Juli 1946

Setelah pendudukan Amerika Serikat kembali ditegakkan di Filipina, Jenderal Mc. Arthur sebagai panglima tertinggi tentara Sekutu menjadi penguasa di Filipina. Persoalan baru yang dihadapi Mc. Arthur adalah masalah kelompok kolaborator di Filipina yang terdiri atas para elit intelektual Filipina generasi kedua.¹³ Ketika Mc. Arthur meninggalkan Filipina, sekelompok tokoh Filipina mengikutinya termasuk Sergio Osmena dan Carlos Romulo. Mereka membentuk pemerintahan *de facto*

¹³ Elit intelektual Filipina yang berperan dalam percaturan politik sebelum dan selama Perang Dunia II adalah generasi kedua yaitu hasil didikan Amerika Serikat. Elit intelektual generasi pertama Filipina adalah mereka yang dihasilkan oleh pendidikan Spanyol seperti Jose Rizal dan Aquinaldo. Di antara kelompok generasi kedua ini adalah Manuel Roxas, Manuel Queson, dan Sergio Osmena.

Filipina di pengasingan dan harapannya adalah akan membentuk pemerintahan Filipina merdeka pasca perang sesuai dengan berlalunya masa Persemakmuran Filipina.

Namun demikian kondisi baru muncul di Filipina yang sangat penting bagi Amerika Serikat, yaitu semakin menguatnya kelompok komunis di tingkat masyarakat. Kelompok Hukbalahap yang terkenal sebagai gerakan bawah tanah di jaman Jepang telah menarik simpati rakyat dan memperluas pengaruhnya. Hal ini tidak dikehendaki oleh Mc. Arthur yang menghadapi persoalan lain dengan kelompok Osmena. Pada sisi lain golongan kolaborator berhasil menarik simpatinya dengan memosisikan sebagai anti-komunis. Pertimbangan politik yang mengarah pada konflik ini memaksa Mc. Arthur untuk mengadakan pemilihan umum antara kubu Osmena dan kubu Manuel Roxas yang mewakili eks-kolaborator.

Dalam pemilihan yang diadakan tanggal 23 April 1946, Manuel Roxas meraih kemenangan tipis atas Sergio Osmena. Berdasarkan hasil pemilu tersebut, Roxas disahkan sebagai presiden Republik Filipina yang diberikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Juli 1946.¹⁴ Pemerintah Amerika Serikat secara politik melepaskan Filipina, namun masih meninggalkan ikatan perjanjian di bidang pertahanan dan ekonomi.

¹⁴ Pada mulanya Amerika Serikat menghendaki agar kemerdekaan diberikan pada tanggal 4 Juli 1946, namun kelompok elit Filipina menolak karena tanggal tersebut sama dengan tanggal kemerdekaan Amerika Serikat. Hal ini dimaksudkan untuk mengaburkan citra bahwa kemerdekaan Filipina merupakan budi baik Amerika Serikat.

Dalam menghadapi perang dingin melawan komunis, Amerika Serikat menggunakan Filipina sebagai pangkalan militernya. Di bidang ekonomi Filipina sangat tergantung pada kerjasama dengan Amerika Serikat dan beberapa aspek tertentu dalam perdagangan Filipina tetap dimonopoli oleh Amerika Serikat sampai akhirnya terbebas sama sekali pada tahun 1974.

Penutup

Dari penjelasan di atas bias diketahui bahwa proses perjalanan sejarah Filipina hingga kemerdekaan merupakan periode perubahan yang terkait erat dengan kekuatan di luar Filipina sendiri. Masa penjajahan Spanyol, Amerika Serikat dan Jepang telah membentuk jatidiri bangsa Filipina. Dengan pola penjajahan yang berbeda-beda, hanya Amerika Serikat yang mampu mengikat bangsa Filipina sebagai satu-satunya bangsa di Asia Tenggara yang tetap menjalin hubungan erat dengan bekas penjajahnya. Filipina juga merupakan sebuah contoh bentuk imperialism modern yang tidak lagi mendasarkan pada bentuk kekuasaan fisik namun cenderung pada menciptakan ketergantungan ekonomi jangka panjang. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh para kolonialis Eropa, yang cenderung menekankan pada bentuk dominasi fisik.

Pada sisi yang lain, Filipina juga menunjukkan kesamaan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kelompok elit yang tampil sebagai penguasa baru adalah hasil didikan Barat yang melakukan kerjasama dengan Jepang. Bentuk pemerintahan

yang diambil oleh kelompok ini cenderung mengikuti model Barat, khususnya Amerika Serikat. Demikian juga dalam struktur sosial masyarakatnya, Filipina muncul sebagai negara dengan bentuk masyarakat yang plural meskipun dominasi pengaruh etnis Cina cukup menyolok pada lapisan atas. Masyarakat plural ini terbentuk sebagai hasil dari proses perubahan yang terjadi selama beberapa abad dominasi Barat, seperti halnya di bagian lain Asia Tenggara.

Sumber:

- Constantino, Renato *Neocolonial Identity and Counter Consciousness*, London: Merlin Press, 1978.
- Hall, D.G.E. *Sejarah Asia Tenggara*, terj. Soewarno, Surabaya: Usaha Nasional, 1988.
- Hanna, Willard A. dan Des Alwi, *Turbulent Times Past in Ternate and Tidore, Mollucas*: Rumah Budaya Banda Naira, 1990.
- Harrison, Brian. *Southeast Asia A Short History*, London: MacMillan, 1954.
- Knaap, G.J. Kruidnagelen en Christenen: *De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Bevolking van Ambon 1656-1696*. Dordrecht: Foris Publications, 1987.
- Parry, J.H. *The Spanish Seaborne Empire*. London: Hutchinson, 1971.
- Steinberg, Davis Joel. *The Philippines: A Singular and a Plural Place*, Boulder: Westview Press, 1994.
- Tate, D.J.M. *The Making of Modern Southeast Asia*, Volume I, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1977
- van Fraasen, Ch. F. *Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel, deel II* (disertasi S3 Rijkuniversiteit Leiden, 1987